

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah

1. Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap investasi dalam negeri di Provinsi D.I Yogyakarta namun pengaruhnya positif yang berarti bahwa suku bunga yang rendah akan menurunkan investasi dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh turunnya investasi bangunan maupun non bangunan karena rendahnya permintaan kredit property, apartemen dan ruko kantor di Provinsi DI Yogyakarta
2. Pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi dalam negeri di Provinsi D.I Yogyakarta karena pendapatan per kapita di Provinsi Yogyakarta tergolong rendah yang disebabkan oleh UMP di DI Yogyakarta yang rendah sehingga masyarakat lebih mementingkan memenuhi biaya hidupnya daripada berinvestasi.
3. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi dalam negeri di Provinsi D.I Yogyakarta karena kenaikan inflasi terjadi pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh permintaan akan komoditas pangan diawal masa pemulihan Covid-19 yang menyebabkan daya beli pada masyarakat menurun sehingga menyebabkan berkurangnya keuntungan investasi dan membuat minat investor untuk berinvestasi turun.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank Indonesia sebaiknya mengeluarkan kebijakan untuk menarik para investor untuk berinvestasi sehingga suku bunga tinggi dapat menarik minat investor, dengan begitu akan menarik minat investor dalam negeri untuk berinvestasi di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Untuk meningkatkan UMP di Provinsi Yogyakarta, pemerintah harus mengakulasi setiap pendapatan masyarakat sehingga masyarakat akan melakukan investasi dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Pemerintah harus terus menjaga tingkat inflasi agar tingkat resiko investasi juga stabil sehingga investasi dalam negeri di Provinsi D.I Yogyakarta akan terus meningkat.
4. Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian tentang investasi dalam negeri di Provinsi D.I Yogyakarta dapat menggunakan variabel bebas lainnya seperti kelembagaan, tenaga kerja pada industri dan situasi politik dalam negeri.